| **Rancangan Peraturan** | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh RPOJK** | **Penjelasan** |
| OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA |  |  |  |
| NOMOR …. TAHUN 2024 |  |  |  |
| TENTANG |  |  |  |
| LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |  |
|  |  |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
| Menimbang: | 1. UMUM |  |  |
| 1. Bahwa untuk mewujudkan upaya Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang sehat dan berintegritas diperlukan penguatan dan pengembangan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi secara komprehensif. | Perkembangan teknologi informasi berpengaruh besar pada industri jasa keuangan (IJK). Digitalisasi IJK telah mendorong IJK untuk berinovasi secara cepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu IJK yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir adalah industri teknologi finansial (financial technology/fintech), khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI).  Lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan diharapkan akan memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan LPBBTI yang inklusif dan berkelanjutan (sustainable) menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat, serta terpercaya.  Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan amanat dari Pasal 108, Pasal 109, Pasal 115 ayat (5), Pasal 117 Pasal 123 ayat (4), Pasal 125, Pasal 252 UU PPSK dan Semakin kompleksnya kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi maka diperlukan penyempurnaan regulasi eksisting. |  |  |
| 1. Bahwa upaya mewujudkan penguatan dan pengembangan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dapat dilakukan dengan menyempurnakan Pengaturan di bidang Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |  |
| 1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurud b perlu Menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penguatan dan pengembangan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM | 1. PASAL DEMI PASAL |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Pasal 1 |  |  |
| 1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang selanjutnya disingkat LJK Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI. |  |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
| 1. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam LPBBTI yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan. |  |  |  |
| 1. Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan. |  |  |  |
| 1. Pengguna LPBBTI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Dana dan Penerima Dana. |  |  |  |
| 1. Direksi: |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas ; atau |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris: |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Perseroan Terbatas; atau |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Penyelenggara yang dilakukan di kantor Penyelenggara dan/atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dsengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik. |  |  |  |
| 1. Asosiasi adalah asosiasi Penyelenggara yang ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat penunjukan asosiasi dari Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. |  |  |  |
| 1. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. |  |  |  |
| 1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Penyelenggara atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Penyelenggara lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Penyelenggara yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Penyelenggara yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Penyelenggara yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. |  |  |  |
| 1. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Penyelenggara atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Penyelenggara baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Penyelenggara yang meleburkan diri dan status badan hukum Penyelenggara yang meleburkan diri berakhir karena hukum. |  |  |  |
| 1. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk mengambil alih saham Penyelenggara lain yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas Penyelenggara beralih karena hukum kepada 2 (dua) Penyelenggara atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Penyelenggara beralih karena hukum kepada 1 (satu) Penyelenggara atau lebih. |  |  |  |
| 1. Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum Penyelenggara setelah pencabutan izin usaha Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Penyelenggara sebagai akibat pencabutan izin usaha Penyelenggara dan Pembubaran. |  |  |  |
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi. |  |  |  |
| 1. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. *Escrow Account* adalah rekening giro di bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada Pengguna. |  |  |  |
| 1. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi Pengguna(*end user*)yang termasuk dalam atau bagian dari *Escrow Account*, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu. |  |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan,  dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal Penyelenggara sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal Penyelenggara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KELEMBAGAAN PENYELENGGARA LPBBTI |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 2 |  |  |
| Badan hukum Penyelenggara berbentuk:   1. perseroan terbatas; atau | Cukup jelas. |  |  |
| 1. koperasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 3 |  |  |
| 1. Penyelenggara hanya dapat dimiliki oleh: 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemerintah Daerah; |  |  |  |
| 1. warga negara indonesia; |  |  |  |
| 1. badan hukum Indonesia; |  |  |  |
| 1. badan hukum asing; dan/atau |  |  |  |
| 1. warga negara asing. |  |  |  |
| 1. Ketentuan kepemilikan untuk yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. |  |  |  |
| 1. Kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan bersama: |  |  |  |
| 1. Pemerintah; |  |  |  |
| 1. Pemerintah Daerah; |  |  |  |
| 1. warga negara Indonesia; dan/atau |  |  |  |
| 1. badan hukum Indonesia. |  |  |  |
| 1. Kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan melalui transaksi di Pasar Modal. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan Perusahaan harus memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lambat 1 tahun setelah tanggal izin usaha sebagai Penyelenggara dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 4 |  |  |
| 1. Penyelenggara harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat pendirian. | Cukup jelas |  |  |
| 1. Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara pada: |  |  |  |
| * 1. bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara konvensional; atau |  |  |  |
| * 1. bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Penyelenggara dilarang berasal dari: |  |  |  |
| 1. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; dan |  |  |  |
| 1. pinjaman. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Pemegang Saham Pengendali |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 5 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) PSP. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP lebih dari 1 (satu) pihak, Penyelenggara wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP tersebut menjadi PSP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 6 |  |  |
| 1. Setiap Pihak dilarang menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara konvensional atau 1 (satu) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. | Contoh larangan menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu)  Penyelenggara konvensional atau 1 (satu) Penyelenggara  berdasarkan Prinsip Syariah:   1. A merupakan PSP pada PT X yang merupakan Penyelenggara konvensional. A tidak dapat menjadi PSP pada Penyelenggara konvensional lainnya. 2. B merupakan PSP pada PT Y yang merupakan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. B tidak dapat menjadi PSP pada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah lainnya. A merupakan PSP pada PT X yang merupakan Penyelenggara konvensional dapat menjadi PSP pada PT Y yang merupakan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. 3. A merupakan PSP pada PT X yang merupakan Penyelenggara konvensional dapat menjadi PSP pada PT Y yang merupakan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika PSP merupakan Negara Republik Indonesia. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 7 |  |  |
| 1. PSP wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penyelenggara, jika kerugian tersebut timbul karena: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. PSP baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Penyelenggara untuk kepentingan PSP; |  |  |  |
| * + - * 1. PSP terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara; atau |  |  |  |
| * + - * 1. PSP baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Penyelenggara, yang mengakibatkan kekayaan Penyelenggara menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan. |  |  |  |
| 1. PSP dinyatakan bertanggung jawab jika memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: |  |  |  |
| 1. keputusan RUPS bagi Penyelenggara yang merupakan perusahaan terbuka; |  |  |  |
| 1. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau |  |  |  |
| 1. keputusan Otoritas Jasa Keuangan untuk kerugian yang timbul karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Perizinan Usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 8 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara dilarang melakukan Pendanaan sebelum terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik. | Ayat (5)  Yang dimaksud dengan “sejak tanggal” adalah perhitungan waktu dimulai pada saat tanggal yang ditentukan. Contoh: apabila Penyelenggara terdaftar pada tanggal 5 Juni, maka tanggal dimaksud diperhitungkan. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melakukan pendanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara: | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. tidak memenuhi ketentuan pada ayat (6); dan/atau |  |  |  |
| * 1. tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan membatalkan izin usaha yang telah diterbitkan bagi Penyelenggara. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 9 |  |  |
| 1. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen paling sedikit: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, jika ada; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham; | Huruf c  Pemegang saham terakhir yang biasa dikenal dengan ultimate shareholder.  Pemilik manfaat yang biasa dikenal dengan beneficial owner. |  |  |
| * 1. susunan organisasi yang memuat susunan personalia yang terdiri dari direksi, dewan komisaris, dan fungsi-fungsi dalam kegiatan usaha Penyelenggara; | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. data pemegang saham atau anggota; | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal bagi calon pemegang saham orang perseorangan; | Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana bagi calon pemegang saham orang perseorangan; | Huruf g  Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan” antara lain rekening koran dan sertifikat deposito. |  |  |
| * 1. fotokopi bukti pelunasan modal disetor; | Huruf h  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. dokumen yang membuktikan bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman; | Huruf i  Contoh dokumen yang membuktikan bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman antara lain:   1. informasi mengenai pemegang saham dari system layanan informasi keuangan, 2. dokumen yang setara dari otoritas negara lain, 3. rekening koran, dan lain-lain. |  |  |
| * 1. data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, anggota pengurus, anggota pengawas, | Huruf j  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. bukti sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris; | Huruf k  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. bukti kesiapan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha; | Huruf l  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. rencana kerja termasuk sistem dan prosedur kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama; | Huruf m  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. pedoman penerapan manajemen risiko; | Huruf n  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. pedoman tata kelola Penyelenggara; | Hururf o  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. tambahan dokumen bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah; | Huruf p  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. konfirmasi dari otoritas pengawas pihak asing yang bersangkutan, untuk Penyelenggara yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan | Huruf q  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha. | Huruf r  Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan” yaitu tanda bukti secara sah atas pembayaran biaya perizinan Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam rangka proses perizinan, Penyelenggara melakukan pemaparan model bisnis dan Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “pemaparan Sistem Elektronik” adalah pemaparan terkait Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Penyelenggara, alur Pendanaan baik dari Pemberi Dana dan Penerima Dana, keandalan Sistem Elektronik, dan pengintegrasian sistem Elektronik dengan sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat di lakukan oleh pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen atau diperlukan perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara menyampaikan kekurangan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik, calon Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan izin usaha. | Ayat (8)  Yang dimaksud dengan “kelengkapan dokumen” adalah dokumen telah lengkap serta memenuhi syarat dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap. | Ayat (9)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perizinan usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (10)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan perizinan dan persetujuan LPBBTI. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. mendukung kebijakan nasional; | Huruf a  Yang dimaksud dengan mendukung kebijakan nasional adalah pertimbangan yang dimaksudkan agar pertumbuhan LPBBTI tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau lembaga terkait. |  |  |
| * 1. menjaga kepentingan publik; | Huruf b  Yang dimaksud dengan menjaga kepentingan publik adalah pertimbangan yang dimaksudkan agar LPBBTI senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau. |  |  |
| * 1. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau | Huruf c  Yang dimaksud dengan menjaga pertumbuhan industri adalah pertimbangan yang dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal melalui peningkatan nilai dan volume pendanaan yang ada di masyarakat. |  |  |
| * 1. menjaga persaingan usaha yang sehat. | Huruf d  Yang dimaksud dengan menjaga persaingan usaha yang sehat adalah pertimbangan yang dimaksudkan agar LPBBTI dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Konversi dari Penyelenggara Konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 11 |  |  |
| 1. Penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan konversi dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaksanaan konversi dari Penyelenggara konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan dengan Prinsip Syariah harus memenuhi ketentuan: |  |  |  |
| * 1. memenuhi ekuitas minimum yang dipersyaratkan; dan |  |  |  |
| * 1. konversi yang dilakukan tidak merugikan Pengguna. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara harus memuat rencana konversi dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib mengumumkan rencana konversi dan dampak konversi terhadap Pengguna melalui Sistem Elektronik berupa situs web dan/atau aplikasi mobile. |  |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan konversi, Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| 1. bukti pengumuman terkait rencana konversi dan dampak konversi terhadap Pengguna melalui Sistem Elektronik berupa situs web dan/atau aplikasi *mobile*; |  |  |  |
| 1. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: |  |  |  |
| * 1. nama berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| * 1. maksud dan tujuan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan |  |  |  |
| * 1. wewenang dan tanggung jawab DPS; |  |  |  |
| 1. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; |  |  |  |
| 1. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna; |  |  |  |
| 1. proyeksi laporan keuangan awal dari kegiatan usaha Penyelengara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi; |  |  |  |
| 1. rencana kerja terkait kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. rancangan perjanjian kerja sama Escrow Account dan Virtual Account dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Untuk proses konversi, Penyelenggara melakukan pemaparan model bisnis dan Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 12 |  |  |
| * + 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| * 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen; |  |  |  |
| * 1. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan konversi; |  |  |  |
| * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS; dan |  |  |  |
| * 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| * + 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| * + 1. Dalam hal permohonan persetujuan konversi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan konversi kepada Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
| * + 1. Dalam hal permohonan persetujuan konversi ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 13 |  |  |
| * + 1. Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan konversi dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Penyelenggara belum melaksanakan RUPS yang menyetujui konversi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 14 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| 1. salinan akta perubahan anggaran dasar; |  |  |  |
| 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi; |  |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelengara berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; |  |  |  |
| 1. bukti pengangkatan anggota DPS dan bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS; |  |  |  |
| 1. pengesahan DPS atas kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. perjanjian kerja sama *Escrow Account* dan *Virtual Account* dengan bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. salinan aplikasi (khusus Penyelenggara berbasis aplikasi *mobile*); dan |  |  |  |
| 1. salinan elektronik seluruh lampiran dokumen laporan. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |  |
| 1. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); |  |  |  |
| 1. memberikan persetujuan atau penolakan perubahan izin usaha sebagai Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan |  |  |  |
| 1. memberikan persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas akad yang digunakan oleh Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan: |  |  |  |
| 1. persetujuan atau penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan |  |  |  |
| 1. persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas akad yang digunakan oleh Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan menyetujui atau mencatat atas akad yang digunakan oleh Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |  |
| 1. menetapkan keputusan pemberian izin usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. menerbitkan surat persetujuan atau pencatatan atas akad yang digunakan oleh Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk: |  |  |  |
| * 1. menetapkan izin usaha; dan/atau |  |  |  |
| * 1. menyetujui atau mencatat atas akad yang digunakan oleh Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah, |  |  |  |
| penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 15 |  |  |
| * + 1. Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi wajib melaporkan pelaksanaan konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. | Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. Pelaporan pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima  Unit Usaha Syariah |  |  |  |
| Paragraf 1  Pembentukan Unit Usaha Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 16 |  |  |
| 1. Penyelenggara konvensional yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah wajib mendirikan UUS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang menerima Pendanaan berdasarkan prinsip Syariah wajib menyalurkannya berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. Anggaran dasar Penyelenggara konvensional yang memiliki UUS wajib memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dalam anggaran dasarnya. |  |  |  |
| 1. UUS wajib mempunyai DPS. |  |  |  |
| 1. UUS wajib mempunyai pembukuan terpisah dari Penyelenggara induk. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 17 |  |  |
| 1. UUS harus memiliki modal kerja pada saat pendirian paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau UUS dari bank umum di Indonesia. |  |  |  |
| 1. Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan di dalam surat keputusan Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 18 |  |  |
| 1. Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib memperoleh izin pembentukan UUS dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memperoleh izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| 1. salinan akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: |  |  |  |
| 1. salah satu maksud dan tujuan Penyelenggara yaitu melakukan kegiatan usaha Pendanaan Syariah; dan |  |  |  |
| 1. wewenang dan tanggung jawab DPS, |  |  |  |
| disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; |  |  |  |
| 1. fotokopi bukti setoran modal kerja UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin pembentukan UUS; |  |  |  |
| 1. surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya; |  |  |  |
| 1. data pimpinan UUS, meliputi: |  |  |  |
| 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; |  |  |  |
| 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak; |  |  |  |
| 1. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; |  |  |  |
| 1. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS; |  |  |  |
| 1. surat pernyataan yang menyatakan: |  |  |  |
| 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan |  |  |  |
| 1. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Penyelenggara yang sama; dan |  |  |  |
| 1. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah; |  |  |  |
| 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor UUS beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan; |  |  |  |
| 1. risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS; |  |  |  |
| 1. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Penyelenggara; |  |  |  |
| 1. dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan Pendanaan Syariah dan contoh akad Pendanaan Syariah; dan |  |  |  |
| 1. rencana kerja UUS yang akan dibentuk, paling sedikit memuat: |  |  |  |
| * 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; |  |  |  |
| * 1. target penyaluran Pendanaan Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; |  |  |  |
| * 1. sistem dan prosedur kerja; |  |  |  |
| * 1. jumlah dan susunan personalia; dan |  |  |  |
| * 1. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas: |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan; |  |  |  |
| 1. laporan laba rugi komprehensif; dan |  |  |  |
| 1. laporan arus kas, |  |  |  |
| 1. beserta asumsi yang digunakan; |  |  |  |
| 1. Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Perusahaan Pembiayaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 19 |  |  |
| * + 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap | Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; |  |  |  |
| 1. pemeriksaan setoran modal kerja UUS; |  |  |  |
| 1. analisis kelayakan atas rencana kerja UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i; |  |  |  |
| 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota DPS; dan |  |  |  |
| 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendanaan Syariah. |  |  |  |
| * + 1. Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |  |
| 1. menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS; dan |  |  |  |
| 1. memberikan persetujuan atau pencatatan atas akad yang digunakan oleh UUS. |  |  |  |
| * + 1. Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 20 |  |  |
| UUS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha Pendanaan Syariah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin pembentukan UUS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 21 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang memiliki UUS wajib memiliki direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan syariah atau Perusahaan Pembiayaan Syariah dan komitmen dalam pengembangan UUS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 22 |  |  |
| 1. UUS wajib dipimpin oleh seorang pimpinan UUS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memenuhi ketentuan: |  |  |  |
| * + - * 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; |  |  |  |
| * + - * 1. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama; dan |  |  |  |
| * + - * 1. mempunyai keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 23 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melaporkan perubahan pimpinan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan pimpinan UUS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaporan perubahan pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 2 |  |  |  |
| Penutupan UUS |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 24 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang akan menutup UUS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penutupan UUS dilarang merugikan kepentingan Pengguna. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara yang akan melakukan penutupan UUS wajib: |  |  |  |
| memberitahukan rencana penutupan UUS kepada Pengguna; |  |  |  |
| menyampaikan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna; |  |  |  |
| menyelesaikan keberatan dari Pengguna, apabila terdapat keberatan dari Pengguna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |  |
| menyelesaikan hak dan kewajiban UUS yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan kepentingan para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya. |  |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui penghentian kegiatan usaha Pendanaan Syariah; |  |  |  |
| alasan penutupan UUS; |  |  |  |
| daftar penyaluran Pendanaan Syariah yang telah dilakukan disertai dengan informasi nama Pengguna, nominal Pendanaan Syariah yang diterima, dan jangka waktu Pendanaan Syariah; dan |  |  |  |
| prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna UUS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 25 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan penutupan UUS diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam memproses permohonan persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5); dan |  |  |  |
| analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan penutupan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan atas rencana penutupan UUS kepada Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan penutupan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 26 |  |  |
| Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan rencana penutupan UUS wajib: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. melaksanakan RUPS yang menyetujui penghentian kegiatan usaha UUS; |  |  |  |
| 1. menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS; |  |  |  |
| 1. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha UUS dan rencana penyelesaian kewajiban UUS dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan UUS; dan |  |  |  |
| 1. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban UUS paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan UUS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 27 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melaporkan penghentian kegiatan usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf d diselesaikan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaporan penghentian kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| 1. salinan keputusan mengenai pemberian izin pembentukan UUS; |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan UUS terakhir; |  |  |  |
| 1. bukti pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c; |  |  |  |
| 1. bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 24 ayat (5) huruf d; dan |  |  |  |
| 1. surat pernyataan dari Direksi Penyelenggara yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban UUS telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dan gugatan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Peyelenggara. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. penelitian atas laporan pelaksanaan rencana penutupan UUS; dan |  |  |  |
| 1. menetapkan keputusan pencabutan izin pembentukan UUS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf 3 |  |  |  |
| Pemisahan UUS |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 28 |  |  |
| 1. Penyelenggara dapat memisahkan UUS menjadi LPBBTI Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: |  |  |  |
| 1. Penyelengara yang melakukan Pemisahan UUS dan Penyelenggara Syariah hasil Pemisahan UUS harus memenuhi tingkat kesehatan paling rendah sehat; dan |  |  |  |
| 1. tidak merugikan kepentingan Pengguna. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mendirikan LPBBTI Syariah baru. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 29 |  |  |
| Pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi LPBBTI Syariah hasil Pemisahan harus dilakukan secara tunai dan penuh dalam bentuk: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. deposito berjangka atas nama LPBBTI Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia; dan/atau |  |  |  |
| 1. bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi keuangan syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 30 |  |  |
| * + 1. Penyelenggara wajib melakukan Pemisahan UUS dalam hal memenuhi kriteria: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. nilai aset unit usaha syariah telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset Penyelenggara induknya berdasarkan laporan bulanan terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan |  |  |  |
| 1. ekuitas unit usaha syariah telah mencapai paling sedikit sebesar ekuitas minimum Penyelenggara. |  |  |  |
| * + 1. Unit usaha syariah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemisahan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 31 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang akan melakukan Pemisahan UUS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| 1. rancangan akta Pemisahan UUS; |  |  |  |
| 1. rancangan akta pendirian LPBBTI Syariah baru; |  |  |  |
| 1. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna UUS; |  |  |  |
| 1. rencana daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari LPBBTI Syariah baru; |  |  |  |
| 1. data pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dari LPBBTI Syariah baru; |  |  |  |
| 1. surat pernyataan pemegang saham dari LPBBTI Syariah baru yang menyatakan bahwa: |  |  |  |
| 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan |  |  |  |
| 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman; |  |  |  |
| 1. rencana bisnis yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha LPBBTI Syariah, paling sedikit memuat: |  |  |  |
| 1. visi, misi, dan strategi bisnis; |  |  |  |
| 1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi; |  |  |  |
| 1. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: |  |  |  |
| 1. rencana kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. rencana permodalan; |  |  |  |
| 1. rencana pendanaan; |  |  |  |
| 1. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; |  |  |  |
| 1. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan |  |  |  |
| 1. rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; |  |  |  |
| 1. proyeksi secara bulanan atas: |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan; |  |  |  |
| 1. laporan laba rugi komprehensif; dan |  |  |  |
| 1. laporan arus kas, |  |  |  |
| beserta asumsi yang digunakan; |  |  |  |
| 1. proyeksi rasio dan pos tertentu; |  |  |  |
| 1. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha; dan |  |  |  |
| 1. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, bagi LPBBTI Syariah baru hasil Pemisahan UUS. |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS LPBBTI Syariah baru. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 32 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tetap dapat melakukan kegiatan usaha pendanaan dan kegiatan usaha pendanaan Syariah. |  |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2); |  |  |  |
| 1. pemeriksaan pemenuhan ketentuan permodalan; |  |  |  |
| 1. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan UUS; |  |  |  |
| 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS LPBBTI Syariah hasil Pemisahan UUS; dan |  |  |  |
| 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI Syariah. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Syariah hasil Pemisahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemisahan UUS. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan Pemisahan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana Pemisahan UUS kepada LPBBTI yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan Pemisahan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 33 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan rencana Pemisahan UUS dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Penyelenggara belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan rencana Pemisahan UUS yang sebelumnya telah diberikan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 34 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melakukan Pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS; |  |  |  |
| 1. salinan akta Pemisahan UUS; |  |  |  |
| 1. salinan akta pendirian badan hukum, paling sedikit harus memuat: |  |  |  |
| 1. nama dan tempat kedudukan; |  |  |  |
| 1. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. modal disetor; |  |  |  |
| 1. kepemilikan; dan |  |  |  |
| 1. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; |  |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS atas Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; |  |  |  |
| 1. fotokopi bukti pelunasan modal disetor Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham; |  |  |  |
| 1. fotokopi bukti penempatan modal disetor Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara Syariah yang bersangkutan, jika terdapat setoran modal dari pemegang saham; |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan awal atau pembukaan dari Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS; |  |  |  |
| 1. bukti kesiapan infrastruktur dari Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) huruf l; dan |  |  |  |
| 1. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |  |
| 1. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); |  |  |  |
| 1. mencabut izin pembentukan UUS dalam hal permohonan izin usaha kepada Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS disetujui; dan |  |  |  |
| 1. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha kepada Penyelenggara Syariah baru hasil Pemisahan UUS yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 35 |  |  |
| Penyelenggara Syariah baru hasil pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang dengan melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 36 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ayat (3), dan ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 11 ayat (1), ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan/atau Pasal 14 ayat (1) Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Psal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| * 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| * 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi  penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 37 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia untuk setiap tahun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelatihan dan pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menganggarkan dan merealisasikan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia Penyelenggara untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sertifikasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 38 |  |  |
| 1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi kerja” mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang berlaku di bidang teknologi finansial.  Yang dimaksud dengan “lembaga sertifikasi profesi” adalah lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Anggota Direksi yang merupakan warga negara asing wajib memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikasi Bahasa Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan sebagai anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal lembaga sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf k belum terbentuk, sertifikasi keahlian di bidang teknologi finansial dapat dilaksanakan oleh Asosiasi. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Tenaga Kerja Bidang Teknologi Informasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 39 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memiliki tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara. | Ayat (1)  Contoh Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara berupa situs web dan aplikasi mobile |  |  |
| 1. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang Teknologi Informasi meliputi kemampuan di bidang *database*, jaringan, keamanan Sistem Elektronik, dan pemrograman. | Ayat (2)  Untuk keahlian dapat dibuktikan antara lain dengan sertifikasi. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Penggunaan Tenaga Kerja Asing |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 40 |  |  |
| 1. Perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada dari Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| * + - * 1. Fotokopi paspor yang masih berlaku; |  |  |  |
| * + - * 1. Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya: |  |  |  |
| * + - * 1. Rencana program Pendidikan dan pelatihan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan |  |  |  |
| * + - * 1. Rencana penempatan dalam susunan organisasi dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing disertai dengan alasan penggunaan tenaga kerja asing. |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Perusahaan menyampaikan permohonan izin menggunakan tenaga kerja asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 41 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); |  |  |  |
| klarifikasi terhadap calon tenaga kerja asing dalam hal diperlukan; dan |  |  |  |
| analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing kepada Perusahaan bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 42 |  |  |
| 1. Penyelenggara dapat menggunakan tenaga kerja asing dengan kriteria: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penggunaan tenaga kerja asing dilarang melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk masing-masing tenaga kerja asing untuk satu kali masa jabatan dan tidak dapat diperpanjang; dan |  |  |  |
| * 1. dilarang dipekerjakan selain pada bidang Teknologi Informasi sebagai tenaga ahli dengan level satu tingkat di bawah Direksi atau sebagai konsultan. |  |  |  |
| 1. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: |  |  |  |
| 1. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan |  |  |  |
| 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib: |  |  |  |
| 1. menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Penyelenggara; dan |  |  |  |
| 1. menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping untuk 1 (satu) orang tenaga kerja asing. |  |  |  |
| 1. Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya. |  |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Penyelenggara memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |
| 1. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara yang telah mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 43 |  |  |
| 1. Penyelenggara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bentuk perjanjian alih daya dilakukan Penyelenggara melalui perjanjian: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| pemborongan pekerjaan; dan/atau |  |  |  |
| penyediaan jasa tenaga kerja. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara dilarang untuk mengalihdayakan pekerjaan yang menjalankan fungsi: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| penilaian kelayakan Pendanaan; dan/atau |  |  |  |
| Teknologi Informasi. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara tidak dapat mengalihdayaan pekerjaan pada fungsi teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kecuali pada pekerjaan terkait dengan pengembangan teknologi informasi dan operasional teknologi informasi. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara dilarang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan: | Ayat (5) |  |  |
| * + - 1. pihak ketiga berbentuk badan hukum di Indonesia; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * + - 1. pihak ketiga terdaftar pada asosiasi perusahaan sejenis pihak ketiga; | Huruf b  Yang dimaksud dengan “terdaftar pada asosiasi perusahaan sejenis pihak ketiga” adalah asosiasi yang diakui berdasarkan hukum Indonesia atau diakui secara internasional ketika tidak terdapat asosiasi sejenis di Indonesia. |  |  |
| * + - 1. tidak memengaruhi reputasi Penyelenggara; dan | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| * + - 1. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 44 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (9), Pasal 43 ayat (3), dan ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| * 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| * 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 45 |  |  |
| 1. Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pihak Utama. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |
| PSP; |  |  |  |
| anggota Direksi; |  |  |  |
| anggota Dewan Komisaris; dan |  |  |  |
| anggota DPS. |  |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama. |  |  |  |
| 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 46 |  |  |
| 1. Dalam hal Pihak Utama terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian kembali terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 47 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| * 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| * 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KEGIATAN USAHA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Kegiatan Usaha Penyelenggara |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 48 |  |  |
| 1. Kegiatan usaha Penyelenggara terdiri atas: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penyediaan; |  |  |  |
| * 1. pengelolaan; dan |  |  |  |
| * 1. pengoperasian, |  |  |  |
| LPBBTI. |  |  |  |
| 1. Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. | Ayat (2)  Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah bersamaan dengan kegiatan usaha konvensional. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional dapat mendirikan unit usaha syariah. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 49 |  |  |
| 1. LPBBTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. Pendanaan produktif; dan/atau | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “Pendanaan produktif” adalah Pendanaan untuk usaha yang enghasilkan barang dan/atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan eningkatkan pendapatan bagi Penerima Dana.  Pendanaan produktif antara lain *invoice financing*, pengadaan barang pesanan (*purchase order*), pengadaan barang untuk jualan secara daring (*seller online*), fasilitas modal usaha, atau Pendanaan proyek. |  |  |
| * + - * 1. Pendanaan konsumtif. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “Pendanaan multiguna” adalah Pendanaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Penerima Dana untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.  Kegiatan Pendanaan multiguna dilakukan dengan cara langsung kepada Penerima Dana atau tidak langsung kepada Penerima Dana melalui pihak lain |  |  |
| 1. Penyelenggara dilarang memfasilitasi anjak piutang kecuali: | Ayat (2) |  |  |
| anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang; dan | Huruf a  Yang dimaksud dengan “pemberian jaminan” adalah penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dilakukan anjak piutang. |  |  |
| dalam bentuk Pendanaan produktif. | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Penyelenggara ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 50 |  |  |
| 1. Untuk mendukung program pemerintah, Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menjadi mitra distribusi atas surat berharga negara. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dilarang melakukan penawaran selain untuk penjualan pasar perdana tidak termasuk penjualan di pasar sekunder. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Batas Maksimum Pendanaan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 51 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyediakan akses yang sama kepada setiap Pemberi Dana dalam kegiatan usaha LPBBTI. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum Pendanaan: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. kepada setiap Penerima Dana; dan | Huruf a  Yang dimaksud dengan “batas maksimum Pendanaan kepada setiap Penerima Dana” adalah batas maksimum total Pendanaan yang belum dilunasi oleh setiap Penerima Dana dalam satu Penyelenggara.  Contoh:  A merupakan Penerima Dana di Penyelenggara ABCD, A tidak bisa mengajukan permohonan Pendanaan baru apabila total Pendanaan yang belum dilunasi A sudah mencapai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), apabila A sudah melunasi sebagian atau seluruh pinjaman, maka A baru dapat mengajukan permohonan Pendanaan baru kembali sampai dengan total Pendanaan yang belum dilunasi A mencapai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). |  |  |
| * + - * 1. oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya. | Huruf b  Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:   1. ketika Pemberi Dana merupakan perusahaan yang memiliki: 2. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, dan/atau pemegang saham perusahaan; 3. hubungan dengan perusahaan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris; 4. hubungan pengendalian dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung; 5. hubungan kepemilikan saham dalam perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan/atau 6. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama 7. ketika Pemberi Dana merupakan perseorangan yang memiliki: 8. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 9. pegawai yang dipekerjakan secara langsung oleh Pemberi Dana; dan/atau 10. pihak selain huruf a dan huruf b yang bertindak untuk kepentingan Pemberi Dana lain. |  |  |
| 1. Batas maksimum Pendanaan Konsumtif kepada setiap Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Batas maksimum Pendanaan Produktif kepada setiap Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelengara yang akan melakukan pendakaan produktif dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), wajib memenuhi ketentuan: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. memiliki TWP90 maksimal 5% dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan |  |  |  |
| * + - * 1. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dari OJK. |  |  |  |
| 1. Batas maksimum Pendanaan oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari posisi akhir Pendanaan pada akhir bulan. | Ayat (6)  Yang dimaksud dengan “25% (dua puluh lima persen) dari outstanding Pendanaan pada akhir bulan” ditentukan berdasarkan informasi transaksi Pendanaan Penyelenggara sewaktu-waktu.  Contoh:  Pada akhir bulan Penyelenggara menyampaikan informasi Pendanaan sebesar 50M, sehingga bulan berikutnya setiap Pemberi Dana hanya dapat menyalurkan Pendanaan paling banyak sebesar 12,5M (50 x 25%). |  |  |
| 1. Ketentuan batas maksimum Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku bagi Pemberi Dana yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Batas maksimum Pendanaan bagi pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan diterapkan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha jasa keuangan tersebut. |  |  |
| 1. Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat memberikan Pendanaan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari posisi akhir Pendanaan pada akhir bulan. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas maksimum pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (9)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Penyelenggara ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (10)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Pemberi Dana dan Penerima Dana |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 52 |  |  |
| 1. Pemberi Dana dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. warga negara Indonesia; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. warga negara asing; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. badan hukum Indonesia; | Huruf c  Badan hukum Indonesia tidak termasuk pemerintah atau lembaga pemerintah seperti kementerian, badan layanan umum, dan/atau lembaga pengelola dana bergulir. |  |  |
| * 1. badan hukum asing; | Huruf d.  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. badan usaha Indonesia; | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. badan usaha asing; dan/atau | Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. lembaga internasional. | Huruf g  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 53 |  |  |
| 1. Penyelenggara dilarang melakukan Pendanaan selain kepada Penerima Dana yang berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: |  |  |  |
| * + - 1. warga negara Indonesia; |  |  |  |
| * + - 1. badan hukum Indonesia; dan/atau |  |  |  |
| * + - 1. badan usaha Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 54 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomi” adalah tingkat imbal hasil antara lain bunga, bagi hasil, ujrah atau margin. |  |  |
| 1. Batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Perjanjian LPBBTI |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 55 |  |  |
| Perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas: | Cukup jelas. |  |  |
| perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana; dan |  |  |  |
| perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 56 |  |  |
| 1. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat: | Ayat (2) |  |  |
| 1. nomor perjanjian; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. tanggal perjanjian; | Huruf b |  |  |
| 1. identitas para pihak berupa nama Pemberi Dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana; | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. hak dan kewajiban para pihak; | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. jumlah Pendanaan; | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| 1. manfaat ekonomi Pendanaan; | Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| 1. besarnya komisi; | Huruf g  Cukup jelas. |  |  |
| 1. jangka waktu; | Huruf h  Cukup jelas. |  |  |
| 1. rincian biaya; | Huruf i  Cukup jelas. |  |  |
| 1. ketentuan mengenai denda, jika ada; | Huruf j  Cukup jelas. |  |  |
| 1. penggunaan Data Pribadi; | Huruf k  Yang dimaksud dengan “penggunaan Data Pribadi” antara lain persetujuan penggunaan Data Pribadi dari Pemberi Dana dan cakupan penggunaan data oleh Penyelenggara |  |  |
| 1. mekanisme penagihan Pendanaan; | Huruf l  Yang dimaksud dengan “mekanisme penagihan pendanaan” adalah penagihan oleh Penyelenggara dan pengalihan penagihan kepada pihak ketiga. |  |  |
| 1. mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet; | Huruf m  Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet” adalah penyelesaian Pendanaan macet yang dapat dilakukan oleh Pemberi Dana yang terdiri dari penagihan oleh Penyelenggara, pengalihan penagihan kepada pihak ketiga, dan klaim asuransi atau penjaminan. |  |  |
| 1. mekanisme penyelesaian sengketa; dan | Huruf n  Cukup jelas. |  |  |
| 1. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. | Huruf o  Contoh Penyelenggara yang tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya yaitu:   1. Penyelenggara telah mengembalikan tanda berizin ke Otoritas Jasa Keuangan; 2. Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Penyelenggara; dan 3. Penyelenggara sedang melakukan konversi dari penyelenggaraan LPBBTI secara konvensional menjadi penyelenggaraan LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Dana atas penggunaan dananya. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Dana di luar identitas para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. posisi akhir Pendanaan; | Huruf a  Yang dimaksud dengan “posisi akhir Pendanaan” antara lain jumlah sisa Pendanaan yang belum dibayar. |  |  |
| 1. tujuan penggunaan dana; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. manfaat ekonomi Pendanaan; dan | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. jangka waktu Pendanaan. | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal telah ada persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Dana. | Ayat (7)  Penyampaian perjanjian dilakukan dengan menyediakan bagian khusus pada Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara. Contoh situs web atau aplikasi mobile yang memberikan akses kepada Pemberi Dana untuk dapat melihat kembali perjanjian yang telah ditandatangani. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 57 |  |  |
| 1. Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. nomor perjanjian; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. tanggal perjanjian; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. identitas para pihak; | Huruf c  Identitas para pihak hanya mencakup nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atau nomor lain yang dianggap setara. |  |  |
| 1. hak dan kewajiban para pihak; | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. jumlah Pendanaan; | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| 1. manfaat ekonomi Pendanaan; | Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| 1. nilai angsuran; | Huruf g  Cukup jelas. |  |  |
| 1. jangka waktu; | Huruf h  Cukup jelas. |  |  |
| 1. objek jaminan, jika ada; | Huruf i  Cukup jelas. |  |  |
| 1. biaya terkait; | Huruf j  Cukup jelas. |  |  |
| 1. ketentuan mengenai denda, jika ada; | Huruf k  Cukup jelas. |  |  |
| 1. penggunaan Data Pribadi; | Huruf l  Cukup jelas. |  |  |
| 1. mekanisme penyelesaian sengketa; dan | Huruf m  Cukup jelas. |  |  |
| 1. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. | Huruf n  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Dana atas posisi Pendanaan yang diterima. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Dana di luar identitas para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. posisi akhir jumlah Pendanaan; |  |  |  |
| 1. manfaat ekonomi Pendanaan; dan |  |  |  |
| 1. jangka waktu Pendanaan. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberi Dana dan Penerima Dana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 58 |  |  |
| Penyelenggara wajib memastikan Pengguna telah membaca dan memahami isi dari perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. | Yang dimaksud dengan “memastikan Pengguna telah membaca dan memahami isi dari perjanjian” adalah dengan menyediakan fasilitas yang memastikan bahwa Pengguna telah membaca dan memahami isi perjanjian sebelum perjanjian tersebut ditandatangani.  Contoh:  Sebelum Pengguna menyetujui perjanjian di Sistem Elektronik Penyelenggara terdapat notifikasi “Apakah Pengguna telah membaca dan memahami isi perjanjian?” yang disampaikan ke Pengguna. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 59 |  |  |
| Penyelenggara wajib mencantumkan keterangan atau informasi mengenai jangka waktu Pendanaan, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi Pendanaan secara jelas pada Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Manajemen Risiko oleh Penyelenggara |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 60 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * + - 1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; |  |  |  |
| * + - 1. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; |  |  |  |
| * + - 1. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan |  |  |  |
| * + - 1. sistem pengendalian internal yang menyeluruh. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memfasilitasi mitigasi risiko bagi Pengguna. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kegiatan memfasilitasi mitigasi risiko bagi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit: | Ayat (4) |  |  |
| melakukan analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana; | Huruf a  Dalam melakukan analisis risiko Pendanaan yang akan difasilitasi, Penyelenggara dapat melakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, seperti penyedia pengelolaan perkreditan atau data.  Yang dimaksud “analisis risiko Pendanaan” antara lain Penyelenggara melakukan *scoring*/penilaian terhadap calon Penerima Dana yang mengajukan Pendanaan. Calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria untuk menerima dana disajikan kepada calon Pemberi Dana untuk dipilih/diberikan pendanaan. Posisi semua calon Penerima Dana adalah setara atau semuanya layak didanai.  Penyelenggara dilarang mengarahkan calon Pemberi Dana untuk memilih sebagian calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria (layak). Penyelenggara membebaskan (tanpa memberikan masukan/ saran/ arahan) calon Pemberi Dana untuk memilih calon Penerima Dana yang disajikan oleh Penyelenggara.  Contoh:  Dari 5 (lima) orang calon Penerima Dana yang mengajukan, hanya 4 (empat) orang yang memenuhi kriteria berdasarkan scoring/penilaian Penyelenggara untuk didanai (dengan hasil scoring/penilaian yang berbeda atau sama). Penyelenggara menyajikan hasil scoring/penilaian atas 4 (empat) orang kepada calon Pemberi Dana untuk dipilih/didanai.  Penyelenggara dilarang Memberikan masukan/ saran/ arahan agar calon Pemberi Dana memberikan dana ke orang tertentu di antara 4 (empat) orang tersebut. |  |  |
| melakukan verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen; | Huruf b  Dalam melakukan verifikasi identitas Pengguna, Penyelenggara bekerja sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.  Dalam hal memastikan keaslian dokumen, Penyelenggara melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan keaslian dokumen yang disampaikan baik oleh Penerima Dana maupun Pemberi Dana, termasuk dalam hal terdapat agunan dalam proses yang dimaksud |  |  |
| melakukan penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal; | Huruf c  Dalam memfasilitasi Pemberi Dana untuk melakukan penagihan hingga Pendanaan terbayarkan, Penyelenggara dapat melakukan penagihan secara mandiri sampai dengan Pendanaan terbayarkan atau mengalihkan kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Selain itu, Penyelenggara juga dapat mewakili Pemberi Dana untuk melakukan tindakan dalam rangka melakukan penagihan atau penyelesaian pembayaran kepada Penerima Dana. |  |  |
| memfasilitasi pengalihan risiko Pendanaan dalam hal terdapat permintaan dari Pemberi Dana; dan | Huruf d  Dalam rangka pengalihan risiko Pendanaan, dapat dilakukan melalui pengalihan atas risiko yang timbul atas Pendanaan yang dilakukan oleh Pemberi Dana. |  |  |
| memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan. | Huruf e  Yang dimaksud dengan “pengalihan risiko atas objek jaminan” adalah mengasuransikan objek jaminan. Mitigasi risiko lain yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain ketika terdapat agunan dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana, Penyelenggara melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menampung atau  menyimpan objek jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memerhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Penerima Dana. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai managemen risiko oleh Penyelenggara ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 61 |  |  |
| 1. Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib diterapkan untuk: | Ayat (1) |  |  |
| Risiko Strategis; | Huruf a  Yang dimaksud dengan Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. |  |  |
| Risiko Operasional; | Huruf b  Yang dimaksud dengan Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LJKNB. |  |  |
| Risiko Hukum; | Huruf c  Yang dimaksud dengan Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. |  |  |
| Risiko Kepatuhan; dan | Huruf d  Yang dimaksud dengan Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat LJKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB. |  |  |
| Risiko Reputasi. | Huruf e  Yang dimaksud dengan Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LJKNB. |  |  |
| 1. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| *Escrow Account*, *Virtual Account*, Rekening Dana, dan Media Pengalihan Dana Lainnya |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 62 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menggunakan: | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “menggunakan *Escrow Account* dan *Virtual Account/payment gateway* untuk LPBBTI” adalah seluruh kegiatan Pendanaan antara Pengguna bukan melalui rekening Penyelenggara melainkan menggunakan *Escrow Account* dan *Virtual Account/ payment gateway*. |  |  |
| *Escrow Account;* dan |  |  |  |
| *Virtual Accoun*t *atau* *payment gateway*, |  |  |  |
| untuk LPBBTI. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Pemberi Dana menggunakan rekening dana khusus, seluruh dana tetap harus dikirim menggunakan *Virtual Account* atau *payment gateway* untuk kemudian diteruskan kepada *Escrow Account* milik Penyelenggara. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “rekening dana khusus” adalah rekening pada bank yang khusus digunakan untuk transaksi LPBBTI. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyediakan *Virtual Accoun*t atau *payment gateway* bagi setiap Pengguna. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk Pendanaan dan pelunasan Pendanaan, Pengguna melakukan pembayaran melalui *Virtual Account* atau payment gateway ke *Escrow Account* Penyelenggara untuk diteruskan ke masing-masing Pengguna. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu maksimum penempatan dana dari Pemberi Dana yang belum digunakan untuk transaksi Pendanaan pada *Escrow Account* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) hari kerja. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu maksimum penempatan dana pada Escrow *Account* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dari Penerima Dana yang telah melakukan pembayaran atas Pendanaan yang diterima tidak melebihi 1 (satu) hari kerja. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal penempatan dana pada *Escrow Account* yang telah melewati batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Penyelenggara wajib memastikan pengembalian dana tersebut kepada rekening Pengguna pada hari kerja berikutnya. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dana milik Pengguna yang berada pada *Escrow* Account Penyelenggara dan yang sedang disalurkan bukan merupakan aset Penyelenggara. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai *Escrow Account*, *Virtual Account*, Rekening Dana, dan Media Pengalihan Dana Lainnya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (9)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh |  |  |  |
| Tanda Tangan Elektronik |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 63 |  |  |
| 1. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perjanjian selain perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang disusun untuk penyelenggaraan LPBBTI dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik. |  |  |  |
| 1. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam pedoman penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tanda Tangan Elektronik. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedelapan |  |  |  |
| Kerja Sama |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 64 |  |  |
| 1. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan dan lembaga nonkeuangan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “lembaga nonkeuangan” antara lain pemanfaatan data kependudukan, penyelenggara pusat data, kemitraan, dan lainnya. |  |  |
| 1. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. dilaksanakan dengan pihak yang telah terdaftar, berizin, atau yang setara di Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang; |  |  |  |
| * 1. dituangkan dalam suatu perjanjian; dan |  |  |  |
| * 1. telah dimuat dalam rencana bisnis. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama: | Ayat (3) |  |  |
| 1. layanan informatif; | huruf (a)  Yang dimaksud dengan “layanan informatif” adalah layanan yang hanya terbatas pada penyediaan informasi dalam Sistem Elektronik Penyelenggara tanpa ada interaksi lebih lanjut dan tidak diikuti eksekusi transaksi keuangan.  Contoh:  Perusahaan perasuransian melakukan kerja sama layanan informatif dengan Penyelenggara dengan cara pemasangan iklan, ketika Pengguna melakukan klik pada iklan yang dimaksud, Pengguna akan diarahkan menuju situs web milik perusahaan perasuransian tanpa diikuti eksekusi transaksi keuangan. |  |  |
| 1. untuk memfasilitasi mitigasi risiko; dan/atau | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. alih daya, | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| Penyelenggara wajib melaporkan kerja sama dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama layanan informatif dalam Sistem Elektronik Penyelenggara, kerja sama tersebut dilarang dilakukan selain dengan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (6)  Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab penuh” adalah Penyelenggara bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sepanjang pihak lain dimaksud bertindak sesuai dengan perjanjian kerja sama. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 65 |  |  |
| 1. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama pertukaran data untuk peningkatan kualitas LPBBTI. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “kerja sama pertukaran data” adalah kerja sama dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka pertukaran data.  Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain lembaga pengelola informasi perkreditan, penyelenggara alternatif credit scoring berbasis telekomunikasi atau penyelenggara *e-commerce*.  Yang dimaksud dengan “data” adalah data yang dibutuhkan dalam proses *credit scoring*, antara lain Data Pribadi dan data transaksi |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menuangkan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian kerahasiaan data. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memastikan pihak penerima data memenuhi perjanjian kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perjanjian kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. para pihak; |  |  |  |
| 1. jenis data; |  |  |  |
| 1. penggunaan dan pengungkapan data; |  |  |  |
| 1. hak dan kewajiban para pihak; |  |  |  |
| 1. pertanggungjawaban para pihak; dan |  |  |  |
| 1. masa waktu penggunaan dan penyimpanan data. |  |  |  |
| 1. Kerja sama pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan surat izin usaha dari otoritas saat melakukan implementasi kerja sama dan draf perjanjian kerahasiaan data. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kerja sama pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Data Pribadi. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesembilan |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 66 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (3) dan ayat (7), Pasal 57 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), ayat (3), dan ayat (7), Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5)ayat (6), dan ayat (7), Pasal 65 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| * + - 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| * + - 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| SISTEM ELEKTRONIK PENYELENGGARAAN LPBBTI |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Sistem Elektronik |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 67 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menggunakan Sistem Elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Penyelenggara. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan” termasuk kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik. |  |  |
| 1. Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah Sistem Elektronik terdaftar di otoritas yang membawahi bidang komunikasi dan informasi. |  |  |
| 1. Penyelenggara dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) Sistem Elektronik pada masing-masing jenis operasi gawai dan 1 (satu) alamat situs dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 68 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - 1. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; |  |  |  |
| * + - 1. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya; |  |  |  |
| * + - 1. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |  |
| * + - 1. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Rekam Jejak Audit |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 69 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang digunakan dapat mendukung penyediaan rekam jejak audit. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan keperluan lainnya. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “keperluan lainnya” adalah penggunaan rekam jejak audit selain untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian.  Contoh pemeriksaan untuk memperoleh sertifikasi dari organisasi standardisasi internasional (ISO). |  |  |
| 1. Penyelenggara harus memelihara *log* transaksi berdasarkan kebijakan retensi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Sistem Pengamanan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 70 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik yang menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan Teknologi Informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri yang menjalankan kegiatan usaha layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara dalam mengelola Sistem Elektronik wajib memiliki sertifikat sistem manajemen keamanan informasi dengan cakupan menyeluruh. |  |  |  |
| 1. Sertifikat sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimiliki paling lama 6 (enam) bulan setelah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Akses dan Penggunaan Data Pribadi |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 71 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik Data Pribadi untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah persetujuan dari Pengguna secara tertulis atau dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku |  |  |
| 1. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemilik Data Pribadi dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas Data Pribadi miliknya kepada Penyelenggara. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan Data Pribadi yang dikirimkan ke Penyelenggara. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui permohonan secara tertulis. | Ayat (5)  Yang dimaksud dengan “permohonan secara tertulis” yaitu permohonan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau saluran lain dalam Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Jangka Waktu Data dan Penghapusan Data |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 72 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyimpan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik data dapat meminta Penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal penghapusan data terjadi atas permintaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan Data Pribadi milik Pengguna. |  |  |  |
| 1. Mekanisme penghapusan Data Pribadi paling sedikit melalui: |  |  |  |
| penyediaan saluran komunikasi antara Penyelenggara dengan pemilik Data Pribadi; |  |  |  |
| fitur yang memungkinkan pemilik Data Pribadi meminta Penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya; dan |  |  |  |
| pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik. |  |  |  |
| 1. Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan: |  |  |  |
| diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi; |  |  |  |
| diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum; |  |  |  |
| sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; |  |  |  |
| penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; |  |  |  |
| ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi; dan/atau |  |  |  |
| hubungan usaha telah berakhir dan tidak diatur dalam perjanjian. |  |  |  |
| 1. Ketentuan penghapusan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 73 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| peringatan tertulis; |  |  |  |
| denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; |  |  |  |
| pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. | Ayat (9)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. | Ayat (10)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi pendanaan yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari. | Ayat (11)  Yang dimaksud dengan “kesalahan isian data transaksi” adalah setiap kesalahan isian data transaksi yang dilaporkan Penyelenggara melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.  Contoh:  Dalam setiap pelaporan data transaksi terdapat isian beberapa dimensi (kolom), antara lain nama Penyelenggara, nama Pemberi Dana, nama Penerima Dana, besaran manfaat ekonomi, dan tanggal pembayaran. Dalam hal Penyelenggara salah melaporkan dimensi besaran manfaat ekonomi dan tanggal pembayaran, Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan isian data transaksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) x 2 (dua) isian. |  |  |
| 1. Pembayaran atas sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan laporan. | Ayat (12)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pembayaran atas sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggugurkan kewajiban Penyelenggara untuk menyampaikan koreksi atas laporannya. | Ayat (13)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 74 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |
| * + - 1. Rasio permodalan; |  |  |  |
| * + - 1. Kualitas tingkat wanprestasi; |  |  |  |
| * + - 1. Manajemen; |  |  |  |
| * + - 1. Rentabilitas; dan |  |  |  |
| * + - 1. Likuiditas. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Rasio Permodalan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 75 |  |  |
| 1. Rasio Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a diukur dengan cara Penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah). | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara bertahap, sebagai berikut: | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. |  |  |
| * 1. paling sedikit Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2024; dan |  |  |  |
| * 1. paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2025. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Kualitas Tingkat Wanprestasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 76 |  |  |
| 1. Kualitas tingkat wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari TWP90. | Ayat (1)  TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo. |  |  |
| 1. Kualitas tingkat wanprestasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan posisi akhir wanprestasi dan total posisi akhir. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Manajemen |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 77 |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 (dua) faktor komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaskud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: |  |  |  |
| Kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain. |  |  |  |
| Kualitas manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko LPBBTI. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Rentabilitas |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 78 |  |  |
| Untuk mengukur Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d dilakukan dengan membandingkan laba bersih dan total pendanaan. | Yang dimaksud dengan Laba Bersih (*Net Income*) adalah total pendapatan bersih perusahaan setelah mengurangkan semua biaya dan beban, termasuk pajak.  Yang dimaksud dengan Total Pendanaan (*Total Disbursement*) adalah jumlah dana atau biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Likuiditas |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 79 |  |  |
| 1. Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf e ditetapkan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan aset lancar dan liabilitas lancar. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Tingkat Kualitas Pendanaan Penyelenggara |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 80 |  |  |
| 1. Kualitas Pendanaan Penyelenggara terdiri atas: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - 1. lancar; |  |  |  |
| * + - 1. dalam perhatian khusus; |  |  |  |
| * + - 1. kurang lancar; |  |  |  |
| * + - 1. diragukan; dan |  |  |  |
| * + - 1. macet. |  |  |  |
| 1. Kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan: |  |  |  |
| 1. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan; |  |  |  |
| 1. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender; |  |  |  |
| 1. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalendar sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalendar; |  |  |  |
| 1. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui 60 (enam puluh) hari kalendar sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalendar; dan |  |  |  |
| 1. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalendar. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kualitas pendanaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 81 |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan keuangan LPBBTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas JasaKeuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 82 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| peringatan tertulis; |  |  |  |
| pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Prinsip Tata Kelola |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 83 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. keterbukaan; | Huruf a  Keterbukaan (*transparancy*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. |  |  |
| * 1. akuntabilitas; | Huruf b  Akuntabilitas (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungiawaban. |  |  |
| * 1. pertanggungjawaban; | Huruf c  Tanggung jawab (*Responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan dan nilai etika  serta standar, prinsip, dan praktik. |  |  |
| * 1. kemandirian; dan | Huruf d  Independensi (*independency*) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. |  |  |
| * 1. kesetaraan dan kewajaran. | Huruf e  Kewajaran (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 84 |  |  |
| Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
| tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; |  |  |  |
| kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Penyelenggara; |  |  |  |
| kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; dan |  |  |  |
| kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Direksi |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 85 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi wajib memiliki pengalaman manajerial di lembaga jasa keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kredit atau pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “pengalaman manajerial” adalah orang yang telah menduduki jabatan manajerial dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.  Yang dimaksud dengan “bidang kredit/ pembiayaan, manajemen risiko, dan/ atau keuangan” adalah fungsi pekerjaan yang harus ada dalam kegiatan usaha lembaga jasa keuangan sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada maka kegiatan dimaksud akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya. |  |  |
| 1. Bagi Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi wajib memiliki pengalaman operasional paling sedikit 1 (satu) tahun di lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota Direksi dilarang rangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara paling banyak 3 (tiga) perusahaan selain Penyelenggara. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), Penyelenggara dapat menunjuk warga negara asing sebagai Direksi paling banyak separuh dari jumlah anggota Direksi. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Direksi yang berkewarganegaraan asing wajib memiliki: | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| surat izin menetap; dan |  |  |  |
| surat izin bekerja dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Dewan Komisaris |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 86 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial pada lembaga jasa keuangan. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “tingkat manajerial” adalah orang yang telah menduduki jabatan manajerial dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. |  |  |
| 1. Anggota Dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan kecuali paling banyak 3 (tiga) perusahaan selain Penyelenggara. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika: | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. anggota Dewan Komisaris Penyelenggara konvensional merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah; atau |  |  |  |
| * 1. anggota Dewan Komisaris Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Penyelenggara konvensional. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), Penyelenggara dapat menunjuk warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia wajib memiliki: | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. surat izin menetap; dan |  |  |  |
| * 1. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Dewan Pengawas Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 87 |  |  |
| 1. Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota DPS yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 3 (tiga) lembaga keuangan syariah lainnya. | Ayat (2)  Contoh ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 3 (tiga) lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu:  A merupakan anggota DPS dari Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah O. A rangkap jabatan sebagai:   1. anggota DPS pada perusahaan pembiayaan syariah P; 2. anggota DPS pada perusahaan asuransi syariah Q; 3. anggota DPS pada bank umum syariah R; dan 4. anggota DPS pada bank pembiayaan rakyat syariah S |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Rapat Umum Pemberi Dana |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 88 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyusun pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rapat Umum Pemberi Dana dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan terkait perubahan perjanjian penyaluran dana, antara lain: |  |  |  |
| 1. restrukturisasi pemberian dana |  |  |  |
| 1. hapus buku pemberian dana; dan |  |  |  |
| 1. hapus tagih pemberian dana. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Audit Internal |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 89 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memiliki unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit 1 (satu) orang sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang audit. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Unit audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melaksanakan audit internal paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun. |  |  |  |
| 1. Dalam melaksanakan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 90 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 86 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87, Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| * 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| * 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PELAPORAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Pembukaan Kantor Selain Kantor Pusat |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 91 |  |  |
| 1. Penyelenggara dapat membuka kantor selain kantor pusat. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kantor selain kantor pusat dilarang menjalankan Sistem Elektronik yang berbeda dari Sistem Elektronik yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melaporkan pembukaan kantor selain kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pembukaan kantor selain kantor pusat harus dimuat dalam rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |
| 1. Pembukaan kantor selain kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kantor selain kantor pusat tersebut beroperasi menggunakan format 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| * 1. uraian nama kantor dan fungsi kantor; |  |  |  |
| * 1. surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang atau dokumen yang setara; |  |  |  |
| * 1. bukti kepemilikan atau penguasaan atas kantor selain kantor pusat; |  |  |  |
| * 1. uraian yang menyebutkan nama pimpinan, uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor; |  |  |  |
| * 1. bukti pencantuman sistem pemosisian global (global positioning system) alamat kantor selain kantor pusat pada laman Sistem Elektronik; |  |  |  |
| * 1. bukti surat pengangkatan pimpinan kantor selain kantor pusat; dan |  |  |  |
| * 1. surat keputusan Direksi terkait pembukaan kantor selain kantor pusat. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 92 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang akan menutup kantor selain kantor pusat wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal penutupan kantor selain kantor pusat yang dimaksud. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rencana penutupan kantor selain kantor pusat harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Pengguna melalui Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara, informasi mengenai rencana penutupan kantor selain kantor pusat dengan menginformasikan pengalihan layanan kepada kantor pusat atau kantor selain kantor pusat lainnya. |  |  |  |
| 1. Pelaporan penutupan kantor selain kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Direksi menggunakan format 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| surat pengantar yang berisikan alasan penutupan kantor selain kantor pusat; |  |  |  |
| bukti penyampaian pengumuman melalui Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara kepada Pengguna terkait penutupan kantor selain kantor pusat; dan |  |  |  |
| bukti penyampaian pengalihan pelayanan kantor selain kantor pusat yang ditutup ke kantor pusat atau kantor selain kantor pusat terdekat. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Perubahan Nama dan Sistem Elektronik |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 93 |  |  |
| 1. Penyelenggara dapat melakukan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara harus memuat perubahan nama dan/atau Sistem Elektronik dalam rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara yang telah melakukan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau persetujuan dari instansi yang berwenang, dengan melampirkan dokumen surat penerima pemberitahuan atau persetujuan dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Perubahan Alamat |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 94 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rencana perubahan alamat harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |
| 1. Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan disertai: |  |  |  |
| data mengenai alamat kantor yang disertai oleh dokumen pendukung dari instansi yang berwenang yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Penyelenggara; |  |  |  |
| bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Penyelenggara beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan; dan |  |  |  |
| bukti pencantuman sistem pemosisian global (*global positioning system*) alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat pada laman Sistem Elektronik. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Perubahan Model Bisnis |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 95 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melaporkan perubahan model bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak model bisnis direalisasikan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “perubahan model bisnis” adalah perubahan atau penambahan model bisnis yang memiliki perbedaan signifikan dengan model bisnis yang dijalankan oleh Penyelenggara.  Contoh:  Penyelenggara X merupakan platform yang menyediakan layanan Pendanaan multiguna, apabila ingin membuka layanan Pendanaan produktif, maka Penyelenggara melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.  Penyelenggara X bergerak dalam menyalurkan Pendanaan pertanian, apabila Penyelenggara bermaksud untuk melakukan penyaluran Pendanaan bagi pegawai berpenghasilan tetap, maka Penyelenggara melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.  Penyelenggara X yang sebelumnya melakukan penyaluran Pendanaan bagi pegawai berpenghasilan tetap pada suatu perusahaan, ketika ingin melakukan penyaluran Pendanaan  secara umum, maka Penyelenggara melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Rencana perubahan model bisnis harus terlebih dahulu dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaporan atas perubahan model bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan dokumen paling sedikit: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat penjelasan model bisnis, dan proyeksi Pendanaan 3 (tiga) tahun atau lebih; |  |  |  |
| analisis biaya dan manfaat; |  |  |  |
| analisis risiko dan mitigasinya; dan |  |  |  |
| perjanjian kerja sama dengan pihak lain, jika ada. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan perubahan model bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Laporan Data Transaksi Pendanaan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 96 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan data transaksi Pendanaan dengan benar dan lengkap melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara harian. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan mengintegrasikan Sistem Elektronik milik Penyelenggara pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum dapat menerima data transaksi Pendanaan secara waktu nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara melakukan penyampaian data transaksi Pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara harian. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan jangka waktu penyampaian data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau pengumuman melalu~~i~~ sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: | Ayat (6) |  |  |
| * 1. informasi tentang Pengguna; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. informasi transaksi Pendanaan; dan | Huruf b  Yang dimaksud dengan “informasi transaksi Pendanaan” meliputi informasi terkait pengajuan Pendanaan dan pemberian Pendanaan, termasuk posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi, jumlah transaksi, dan jumlah penyaluran |  |  |
| * 1. informasi kualitas Pendanaan. | Huruf c  Yang dimaksud dengan “informasi kualitas Pendanaan” adalah informasi mengenai pembayaran Pendanaan yang terdiri dari tanggal jatuh tempo, status pembayaran, denda, dan nilai pembayaran. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Laporan Berkala Dan Laporan Insidentil |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 97 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Laporan insidentil merupakan laporan yang tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan harus segera dilaporkan.  Contoh laporan adanya tindakan fraud, laporan pelaksanaan audit internal, dan laporan pelaksanaan edukasi. |  |  |
| 1. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * + - 1. laporan bulanan; dan |  |  |  |
| * + - 1. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib mengukur, mengakui, dan menyajikan serta mengungkapkan transaksi dengan pihak terafiliasi yang memenuhi kriteria signikansi tertentu dengan nilai wajar. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan lain selain laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 98 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) secara benar dan lengkap, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “benar” adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada LJKNB dan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar.  Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur laporan dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. |  |  |
| 1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Penyelenggara. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya insiden dimaksud | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat permintaan. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila Penyelenggara memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib mempublikasikan kepada masyarakat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik beserta pendapat auditor atas laporan dimaksud pada Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara. | Ayat (9)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). | Ayat (10)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (11)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 99 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 92 ayat (3), Psal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 98 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9) dan ayat (10) dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| peringatan tertulis; |  |  |  |
| denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; |  |  |  |
| pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan dapat dikenai sanksi administratif lainnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan laporan 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4), Penyelenggara dianggap tidak menyampaikan laporan dan dikenai sanksi peringatan tertulis dan kewajiban membayar denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam laporan yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per baris dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PERUBAHAN KEPEMILIKAN,  PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Perubahan Kepemilikan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 100 |  |  |
| 1. Perubahan kepemilikan meliputi: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| pemegang saham pada Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka; dan |  |  |  |
| PSP pada Penyelenggara berbentuk perusahaan terbuka, |  |  |  |
| wajib memperoleh persetujuan dari OJK. |  |  |  |
| 1. Perubahan kepemilikan meliputi: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. pemegang saham dari pemegang saham Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka; dan |  |  |  |
| 1. pemegang saham pengendali dari pemegang saham Penyelenggara yang berbentuk perusahaan terbuka, |  |  |  |
| wajib dilaporkan kepada OJK. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara dilarang melakukan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan adanya perubahan PSP, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal izin usaha sebagai Penyelenggara dari OJK, kecuali dalam rangka penyehatan Penyelenggara oleh OJK. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan dalam rangka penyehatan Penyelenggara adalah perubahan kepemilikan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan mengenai permodalan Penyelenggara yang masih memiliki prospek usaha (*viable*).  Yang dimaksud dengan perubahan PSP adalah perubahan porsi kepemilikan saham atau struktur pemegang saham sebagai akibat dari jual beli saham baik secara langsung maupun melalui penawaran umum yang mengakibatkan adanya perubahan PSP. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang telah mendapatkan izin usaha pada saat POJK ini diundangkan dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai modal disetor menjadi paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan berasal dari warisan dikecualikan dari kewajiban penyesuaian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4). | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rencana perubahan kepemilikan harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan kepemilikan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam rangka memberikan persetujuan atas perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 101 |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan dokumen: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. rancangan akta RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS; |  |  |  |
| 1. rencana struktur kepemilikan sampai dengan kepemilikan terakhir; |  |  |  |
| 1. salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk perubahan kepemilikan Penyelenggara dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah pusat; |  |  |  |
| 1. salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal pemerintah daerah untuk perubahan kepemilikan dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah; |  |  |  |
| 1. rancangan akta pemindahan hak atas saham atau rancangan akta jual beli saham; |  |  |  |
| 1. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan proforma milik Penyelenggara; |  |  |  |
| 1. fotokopi surat pemberitahuan pajak 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya: |  |  |  |
| 1. pemegang saham baru pada Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka; |  |  |  |
| 1. pemegang saham baru dari pemegang saham Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka; |  |  |  |
| 1. PSP baru pada Penyelenggara berbentuk perusahaan terbuka; dan/atau |  |  |  |
| 1. pemegang saham pengendali baru dari pemegang saham Penyelenggara yang berbentuk perusahaan terbuka, |  |  |  |
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), yang merupakan orang perseorangan; |  |  |  |
| 1. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya; |  |  |  |
| 1. dokumen data debitur dari sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dari calon pemegang saham akibat perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), atau dokumen yang dianggap setara oleh Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |  |
| 1. data pemegang saham Penyelenggara; |  |  |  |
| 1. orang perseorangan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 1; atau |  |  |  |
| 1. badan hukum melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2; |  |  |  |
| 1. bukti penempatan dana dalam *escrow  account* dan/atau deposito berjangka atas nama Penyelenggara atau pemegang saham, jika  perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai; dan |  |  |  |
| 1. bukti kesiapan dana calon pemegang saham. | bukti kesiapan dana calon pemegang saham antara lain:   1. bukti salinan kepemilikan deposito atau kepemilikan dana milik calon pemegang saham pada bank sesuai dengan nilai wajar yang dituangkan dalam rencana akta dan/atau perjanjian jual beli/pengalihan saham; 2. bukti setoran dana yang telah disalurkan kepada Penyelenggara; dan/atau 3. rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak  tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan. |  |  |  |
| 1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan dilakukan dalam jangka waktu paling  lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya  dokumen permohonan perubahan kepemilikan sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 102 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melakukan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan berdasarkan RUPS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan salinan akta RUPS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian ~~Keempat~~ Ketiga |  |  |  |
| Penggabungan dan Peleburan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 103 |  |  |
| 1. Setiap perubahan kepemilikan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| Penggabungan; |  |  |  |
| Peleburan; atau |  |  |  |
| pemisahan |  |  |  |
| 1. Penggabungan, Peleburan, atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rencana penggabungan, Peleburan, atau pemisahan harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga keuangan nonbank. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penggabungan Peleburan, , atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara yang memiliki prinsip Pendanaan yang sejenis. | Ayat (4)  Yang dimaksud dengan “prinsip Pendanaan yang sejenis” adalah:   1. Penyelenggara konvensional melakukan Penggabungan Peleburan, atau pemisahan dengan Penyelenggara konvensional; atau 2. Penyelenggara dengan Prinsip Syariah melakukan Penggabungan Peleburan, atau pemisahan dengan Penyelenggara dengan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan dokumen: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai perseroan terbatas; |  |  |  |
| 1. rancangan akta RUPS yang menyetujui Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; |  |  |  |
| 1. rancangan akta Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; |  |  |  |
| 1. rancangan daftar kepemilikan, bagi Penyelenggara yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; |  |  |  |
| 1. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada masing-masing Penyelenggara; |  |  |  |
| 1. laporan keuangan proforma dari Penyelenggara hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; |  |  |  |
| 1. susunan organisasi hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; |  |  |  |
| 1. daftar pemegang saham dan rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; dan |  |  |  |
| 1. studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Penyelenggara hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan:. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. anggota Direksi; |  |  |  |
| 1. anggota Dewan Komisaris; dan |  |  |  |
| 1. anggota DPS, |  |  |  |
| Penyelenggara wajib melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf m. |  |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan tersebut tidak mengurangi hak Pengguna; |  |  |  |
| 1. Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan telah dimuat dalam rencana bisnis; |  |  |  |
| 1. kondisi keuangan Penyelenggara hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan harus memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2); dan |  |  |  |
| 1. tidak menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 104 |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Penyelenggara. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen. |  |  |  |
| 1. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan kepada Direksi Penyelenggara. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Pelaksanaan dan Persetujuan RUPS Terhadap  Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 105 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang telah mendapatkan persetujuan  rencana pelaksanaan perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana pelaksanaan perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 106 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang mendapatkan persetujuan perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan dokumen: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; |  |  |  |
| 1. salinan akta perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; |  |  |  |
| 1. rancangan anggaran dasar terbaru hasil perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; |  |  |  |
| 1. dokumen yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang; dan |  |  |  |
| 1. bukti pengumuman perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha Penyelenggara yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan, memberikan izin usaha Penyelenggara hasil Peleburan yang mulai berlaku terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib mengumumkan perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan kepada masyarakat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan RUPS. | Ayat (4)  Mengumumkan perubahan kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui surat kabar atau media cetak dan media elektronik atau situs Penyelenggara. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 107 |  |  |
| Penyelenggara yang menerima persetujuan perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan salinan akta pendirian atau anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan, persetujuan, atau penerimaan pemberitahuan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 108 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan, ayat (7), Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 106 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 107 dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Pencabutan Izin Usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 109 |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha Penyelenggara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Penyelenggara: |  |  |  |
| 1. bubar sebagai tindak lanjut atas: |  |  |  |
| 1. keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; |  |  |  |
| 1. putusan pengadilan; |  |  |  |
| 1. keputusan pemerintah; atau |  |  |  |
| 1. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; |  |  |  |
| 1. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha; |  |  |  |
| 1. bubar karena melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan; |  |  |  |
| 1. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal izin usaha ditetapkan; atau |  |  |  |
| 1. mengajukan permohonan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan likuidasi atau penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Pengembalian Izin Usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 110 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang akan menghentikan kegiatan operasional harus mengajukan permohonan rencana pengembalian izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang akan menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak sedang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Permohonan rencana pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen yang memuat: |  |  |  |
| 1. alasan penghentian kegiatan operasional; |  |  |  |
| 1. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna; |  |  |  |
| 1. risalah RUPS mengenai rencana penghentian kegiatan usaha Penyelenggara; dan |  |  |  |
| 1. laporan bulanan terakhir. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Penyelenggara untuk memastikan rencana pengembalian izin usaha serta penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan rencana pengembalian izin usaha paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan rencana pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara wajib menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Penyelesaian Hak dan Kewajiban Pengguna |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 111 |  |  |
| 1. Penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara kepada seluruh Pengguna dilakukan dengan cara: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. posisi akhir pengalihan portofolio Pendanaan yang belum dilunasi; dan/atau |  |  |  |
| 1. mekanisme lain yang disepakati oleh Pengguna. |  |  |  |
| 1. Penyelesaian kewajiban Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (5). |  |  |  |
| 1. Penyelesaian kewajiban Penyelenggara kepada seluruh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang merugikan atau mengurangi hak Pengguna. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 112 |  |  |
| 1. Dalam hal penyelesaian kewajiban kepada Pengguna dilakukan dengan cara mengalihkan posisi akhir portofolio Pendanaan yang belum dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a kepada Penyelenggara lain, Penyelenggara wajib memberitahukan rencana pengalihan portofolio tersebut kepada Pengguna melalui: | Ayat (1) |  |  |
| 1. pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha melalui Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara; dan | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat dan/atau pengumuman melalui media lain kepada setiap Pengguna. | Huruf b  Yang dimaksud dengan “surat” termasuk juga surat elektronik. |  |  |
| 1. Pengalihan total posisi akhir Pendanaan yang belum dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: | Ayat (2) |  |  |
| 1. tidak mengurangi hak Pengguna; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. dilakukan pada Penyelenggara yang memiliki prinsip penyelenggaraan usaha yang sejenis; | Huruf b  Yang dimaksud dengan “prinsip penyelenggaraan usaha yang sejenis” adalah sebagai berikut:  a. Penyelenggara konvensional dengan Penyelenggara konvensional; atau  b. Penyelenggara dengan Prinsip Syariah Penyelenggara dengan Prinsip Syariah |  |  |
| 1. tidak menyebabkan Penyelenggara yang menerima pengalihan portofolio melanggar ketentuan yang berlaku di bidang LPBBTI; dan | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. disetujui oleh Pengguna. | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 113 |  |  |
| Dalam menyelesaikan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Penyelenggara dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk menyelesaikan hak dan kewajiban antar Pengguna dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 114 |  |  |
| 1. Setelah seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pasca Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 115 |  |  |
| 1. Penyelenggara harus menghentikan kegiatan usaha sejak pencabutan izin usaha Penyelenggara. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sejak pencabutan izin usaha Penyelenggara, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Penyelenggara dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Penyelenggara. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 116 |  |  |
| 1. Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan posisi keuangan penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha Penyelenggara. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laporan posisi keuangan penutupan tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk menyusun laporan posisi keuangan penutupan dengan batas waktu tertentu. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik tersebut. | Ayat (3)  Penetapan batas waktu penyampaian laporan posisi keuangan penutupan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain lokasi kantor, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Penyelenggara. |  |  |
| 1. Dalam hal laporan posisi keuangan penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas laporan posisi keuangan penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Biaya penyusunan laporan posisi keuangan penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Penyelenggara. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan posisi keuangan penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima laporan posisi keuangan penutupan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang disusun dan disampaikan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Pembubaran |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 117 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus menyampaikan dokumen: |  |  |  |
| 1. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi; |  |  |  |
| 1. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan |  |  |  |
| 1. pernyataan calon anggota Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 118 |  |  |
| 1. Dalam Pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) wajib mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tindakan pendaftaran, pemberitahuan, dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh RUPS. |  |  |  |
| 1. Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: |  |  |  |
| 1. Pembubaran dan dasar hukumnya; |  |  |  |
| 1. nama dan alamat Tim Likuidasi; |  |  |  |
| 1. tata cara pengajuan tagihan; dan |  |  |  |
| 1. jangka waktu pengajuan tagihan. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 119 |  |  |
| 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan/atau tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi; |  |  |  |
| 1. mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara; |  |  |  |
| 1. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |  |
| 1. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: |  |  |  |
| 1. Pembubaran dan dasar hukumnya; |  |  |  |
| 1. nama dan alamat Tim Likuidasi; |  |  |  |
| 1. tata cara pengajuan tagihan; dan |  |  |  |
| 1. jangka waktu pengajuan tagihan. |  |  |  |
| 1. Seluruh biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban aset Penyelenggara dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 120 |  |  |
| Penyelenggara disebut Penyelenggara dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “dalam likuidasi” disingkat “(DL)” di belakang nama Penyelenggara sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Jangka Waktu Likuidasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 121 |  |  |
| 1. Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi dengan: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; |  |  |  |
| 1. laporan perkembangan proses Likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan |  |  |  |
| 1. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat: | Ayat (5) |  |  |
| 1. menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan Likuidasi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Penyelenggara dalam Likuidasi; atau | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Huruf b  Yang dimaksud dengan “langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain penyelesaian melalui pengadilan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh |  |  |  |
| Pengawasan dan Pelaporan Likuidasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 122 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengawasan pelaksanaan atas Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung pada Penyelenggara dalam Likuidasi. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Ayat (4)  Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penilai independen. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 123 |  |  |
| 1. Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedelapan |  |  |  |
| Pengakhiran Likuidasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 124 |  |  |
| Pelaksanaan Likuidasi selesai dalam hal: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. seluruh kewajiban Penyelenggara dalam Likuidasi telah dibayarkan; |  |  |  |
| 1. tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; atau |  |  |  |
| 1. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 125 |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan Likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada kreditor termasuk tindak lanjut apabila kreditor tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. |  |  |  |
| 1. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Dalam hal kreditor belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi hak kreditor tersebut dititipkan pada pengadilan. |  |  |  |
| 1. Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |
| 1. Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditor yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditor yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4). |  |  |  |
| 1. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditor yang bersangkutan maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesembilan |  |  |  |
| Kepailitan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 126 |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara dalam proses pailit, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan kreditornya, Penyelenggara wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan permohonan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan paling sedikit: |  |  |  |
| 1. nama pihak yang mengajukan pailit; |  |  |  |
| 1. ringkasan permohonan pernyataan pailit yang meliputi: |  |  |  |
| 1. kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai hak pemohon untuk mengajukan permohonan; dan |  |  |  |
| 1. alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci; dan |  |  |  |
| 1. rencana tindak yang akan dilakukan Penyelenggara untuk menindaklanjuti proses pailit. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 127 |  |  |
| Ketentuan mengenai penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis bagi Penyelenggara yang dinyatakan pailit. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 128 |  |  |
| Ketentuan mengenai mekanisme kepailitan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepailitan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 129 |  |  |
| Dalam hal pemberesan harta Penyelenggara yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan kepailitan Penyelenggara berakhir, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesepuluh |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 130 |  |  |
| * + 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3), Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 126, dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| * + 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| * + 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| * + 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| * + 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| * + 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| * + 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| * + 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 1313 |  |  |
| Pihak yang melanggar ketentuan Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), dan/atau Pasal 125 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat peringatan; |  |  |  |
| 1. penghentian sebagai Tim Likuidasi; dan/atau |  |  |  |
| 1. larangan menjadi pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah pada Penyelenggara. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LPBBTI |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Perlindungan Konsumen |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 132 |  |  |
| 1. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. transparansi; |  |  |  |
| 1. perlakuan yang adil; |  |  |  |
| 1. keandalan; |  |  |  |
| 1. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan |  |  |  |
| 1. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. |  |  |  |
| 1. Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Transparansi Penyelenggara |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 133 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib mencantumkan secara jelas nama Penyelenggara pada kantor pusat, kantor selain kantor pusat, dan Sistem Elektronik. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib mencantumkan koordinat sistem pemosisian global (*global positioning system*)pada lamanPenyelenggara mengenai lokasi: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. kantor pusat; dan |  |  |  |
| 1. kantor selain kantor pusat. |  |  |  |
| 1. Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara wajib paling sedikit memuat: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. nama Penyelenggara; |  |  |  |
| 1. logo; |  |  |  |
| 1. nama Sistem Elektronik; |  |  |  |
| 1. profil seluruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham Penyelenggara; |  |  |  |
| 1. kinerja Pendanaan; dan |  |  |  |
| 1. informasi bahwa Penyelenggara diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Kinerja Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat informasi paling sedikit: | Ayat (4) |  |  |
| * + - * 1. nilai Pendanaan yang tersalurkan; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. jumlah Pemberi Dana; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. jumlah Penerima Dana; dan | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. tingkat keberhasilan bayar. | Huruf d  Perhitungan tingkat keberhasilan bayar (TKB), yaitu:  TKB90 = 100% - TWP90    posisi akhir wanprestasi di atas 90 hari  TWP90 = x100%    Total posisi akhir    TKB90 adalah ukuran tingkat keberhasilan Penyelenggara LPBBTI dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban Pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuh tempo.  TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo. |  |  |
| 1. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. sejak melakukan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pada tahun berjalan; dan |  |  |  |
| 1. berupa posisi akhir. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan tingkat keberhasilan bayar ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 134 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Pengguna. | Ayat (1)  Informasi mengenai produk dan/atau layanan antara lain:   * 1. manfaat yang dapat diperoleh;   2. biaya yang harus dibayarkan;   3. risiko yang mungkin harus ditanggung;   4. hak yang dapat diperoleh;   5. kewajiban yang harus dipenuhi;   6. persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi; dan   7. jenis akad yang dapat disepakati. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan udah dimengerti oleh Pengguna pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Pengguna dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh calon Pengguna dan/atau Pengguna negara asing, dokumen mengenai produk dan/atau layanan menggunakan Bahasa Indonesia dan harus disandingkan dengan bahasa asing. | Ayat (5)  Yang dimaksud dengan “bahasa asing” di ayat ini adalah bahasa asing yang digunakan dalam perjanjian internasional. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 135 |  |  |
| * 1. Penyelenggara wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang dibuat dengan memuat: | Ayat (1) |  |  |
| * + - * 1. Inforasi terkait: | Huruf a |  |  |
| nama dan jenis produk dan/atau layanan; | Angka 1  Cukup jelas. |  |  |
| Nama penerbit | Angka 2  Cukup jelas. |  |  |
| Fitur utama | Angka 3  Cukup jelas. |  |  |
| Manfaat | Angka 4  Cukup jelas. |  |  |
| Risiko | Angka 5  Cukup jelas. |  |  |
| Persyaratan dan tata cara | Angka 6  Cukup jelas. |  |  |
| Biaya; dan | Angka 7  Yang dimaksud dengan “biaya” merupakan segala sesuatu pembebanan secara finansial kepada Pengguna antara lain biaya pembukaan, biaya bunga, biaya asuransi, biaya provisi atau komisi, denda, dan penalti.  Jenis biaya yang tidak dapat ditetapkan besarannya di awal diberikan keterangan estimasi atau dasar estimasi yang digunakan berikut penjelasan. |  |  |
| Informasi tambahan; dan | Angka 8  Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. simulasi dan/atau data historis dalam hal produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana. | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) versi:   versi umum; dan  versi personal. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Kewajiban penyediaan ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari produk dan/atau layanan:   2. program pemerintah atau otoritas; dan/atau   3. digunakan secara berulang oleh Konsumen. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai ringkasan informasi produk dan/atau layanan atau yang setara dengan ringkasan informasi produk atas suatu produk dan/atau layanan, PUJK wajib mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Pemasaran Produk dan Layanan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 136 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan |  |  |  |
| * 1. pernyataan bahwa Penyelenggara berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Logo Otoritas Jasa Keuangan tidak dicantumkan dalam pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dan ayat (2). |  |  |  |
| 1. Penyelenggara dilarang menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon Pengguna dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Pengguna dan/atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 137 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Pengguna dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan kepada calon Pengguna. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klasifikasi calon Pengguna yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan mempertimbangkan: |  |  |  |
| 1. latar belakang calon Pengguna; |  |  |  |
| 1. pekerjaan calon Pengguna; |  |  |  |
| 1. keuangan calon Pengguna; |  |  |  |
| 1. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan dari Penyelenggara; dan/atau |  |  |  |
| 1. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon Pengguna. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib mendokumentasikan penilaian kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Pengguna dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan kepada calon Pengguna. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Larangan Iklan Menyesatkan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 138 |  |  |
| 1. Dalam menyampaikan informasi yang dimuat dalam Iklan di berbagai media massa, Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan media massa, antara lain: media sosial, media elektronik, media cetak, media luar griya, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. |  |  |
| 1. Penyelenggara dilarang menyampaikan informasi dalam iklan yang mendorong penggunaan layanan Penyelenggara secara berlebihan melebihi kemampuan konsumen. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai penyampaian informasi yang dimuat dalam iklan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Penagihan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 139 |  |  |
| 1. Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. | Ayat (1)  Surat peringatan dapat disampaikan secara fisik atau digital melalui Sistem Elektronik atau sarana komunikasi pribadi yang terdaftar pada Sistem Elektronik yang digunakan oleh  Penyelenggara. |  |  |
| 1. Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; |  |  |  |
| 1. posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasiatau pokok terutang; |  |  |  |
| 1. manfaat ekonomi Pendanaan; dan |  |  |  |
| 1. denda yang terutang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 140 |  |  |
| 1. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis. |  |  |  |
| 1. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: |  |  |  |
| 1. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; |  |  |  |
| 1. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; |  |  |  |
| 1. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan |  |  |  |
| 1. pihak lain bukan merupakan afiliasi dari pihak Penyelenggara atau Pemberi Dana*.* |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 141 |  |  |
| 1. Dalam melakukan penagihan kepada Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 140 ayat (1), Penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan | Ayat (1)  Norma yang berlaku di masyarakat antara lain norma kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan.  Contoh:   1. tidak menggunakan ancaman, kekerasan dan/atau Tindakan yang bersifat mempermalukan Penerima Dana; 2. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; 3. dilakukan hanya kepada Pemberi Dana; dan 4. tidak dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu jika penagihan menggunakan sarana komunikasi. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memiliki dan menerapkan kode etik perlindungan Pengguna dan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 142 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 134 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 135 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 136 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 137 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, Pasal 140 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN,  PERMOHONAN PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA DALAM JARINGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 143 |  |  |
| 1. Permohonan perizinan, permohonan persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Psal 24 ayat (5), Psal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Psal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 40 ayat (2), Pasal 18, ayat (5), dan ayat (9), Pasal 91 ayat (5), Pasal 92 ayat (4), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (5), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, Pasal 110 ayat (3), dan/atau Pasal 126 ayat (2) disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dengan penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara tidak perlu menyampaikan dokumen cetak. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan setiap dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan merupakan dokumen sesuai dengan dokumen aslinya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Penyelenggara menyampaikan permohonan dalam bentuk data elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 144 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ASOSIASI |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 145 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Asosiasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk mendapat persetujuan dari OJK, asosiasi harus menyampaikan permohonan tertulis kepada OJK, yang dilampiri dokumen: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. fotokopi anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga; dan |  |  |  |
| 1. struktur kepengurusan. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara yang mendapatkan izin usaha setelah Peraturan OJK ini diundangkan, wajib memenuhi ketentuan menjadi anggota asosiasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan izin usaha. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara harus tunduk pada pedoman perilaku pasar yang diterbitkan oleh Asosiasi dalam lingkup LPBBTI. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit: | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. mengkoordinasikan dan menetapkan penyusunan pedoman perilaku pasar; dan |  |  |  |
| * 1. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; dan |  |  |  |
| * 1. tugas lainnya sesuai dengan penugasan dari OJK. |  |  |  |
| 1. Pelaksanaan tugas asosiasi dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Asosiasi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengurus Asosiasi wajib merupakan anggota Direksi dan/atau angota Dewan Komisaris Penyelenggara. | Ayat (9)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Direktur eksekutif Asosiasi wajib memperoleh persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan. | Ayat (10)  Yang dimaksud dengan ‘direktur eksekutif asosiasi’ adalah pihak yang menjalankan pengelolaan asosiasi secara penuh. |  |  |
| 1. Direktur eksekutif Asosiasi yang sedang menjabat pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan apabila dilakukan pengangkatan kembali. | Ayat (11)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 146 |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| STRATEGI ANTI FRAUD |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 147 |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyusunan dan penerapan strategi anti fraud terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu: |  |  |  |
| * + - * 1. pencegahan; |  |  |  |
| * + - * 1. deteksi; |  |  |  |
| * + - * 1. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan |  |  |  |
| * + - * 1. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. |  |  |  |
| 1. Penyusunan dan penerapan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIRERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 148  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan profilerasi senjata pemusnah massal secara efektif. |  |  |  |
| 1. Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan profilerasi senjata pemusnah massal mencakup: |  |  |  |
| * + - * 1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; |  |  |  |
| * + - * 1. kebijakan dan prosedur; |  |  |  |
| * + - * 1. pengendalian intern; |  |  |  |
| * + - * 1. sistem informasi manajemen; dan |  |  |  |
| * + - * 1. sumber daya manusia dan pelatihan. |  |  |  |
| 1. Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan profilerasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan profilerasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PENGAWASAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 149  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan Langsung; dan |  |  |  |
| 1. pemeriksaan tidak langsung. |  |  |  |
| 1. Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap Penyelenggara yang merupakan bagian dari konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan. | Yang dimaksud dengan “bagian dari konglomerasi keuangan” adalah Penyelenggara yang merupakan bagian dari konglomerasi keuangan yang memenuhi kriteria sesuai dengan konglomerasi keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LARANGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 150 |  |  |
| Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang: |  |  |  |
| melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| bertindak sebagai Pemberi Dana atau Penerima Dana; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| mewakili Pemberi Dana untuk melakukan Pendanaan dan/atau menyediakan fitur Pendanaan secara otomatis; | Huruf c  Yang dimaksud dengan “Pendanaan secara otomatis“ adalah Pendanaan yang menggunakan skema dimana Pemberi Dana menyerahkan dananya kepada Penyelenggara untuk disalurkan kepada Penerima Dana tanpa ada interaksi atau keterlibatan Pemberi dana atas Pendanaan yang dilakukan. |  |  |
| memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Pemberi Dana; | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Penerima Dana; | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain; | Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| menerbitkan surat utang; | Huruf g  Yang dimaksud dengan “surat utang” adalah surat berharga bersifat utang jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan penyelenggara kepada pihak lain antara lain berupa surat sanggup bayar (*promissory note*) medium term notes (MTN) atau obligasi. |  |  |
| memiliki pinjaman; | Huruf h  Yang dimaksud dengan “pinjaman” adalah pinjaman berupa uang yang menyebabkan Penyelenggara memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah nilai tertentu. Contoh:   1. pinjaman dari bank; 2. pinjaman dari pemegang saham; dan 3. pinjaman dari sumber lain. |  |  |
| memberikan rekomendasi kepada Pengguna; | Huruf i  Yang dimaksud dengan “dilarang memberikan rekomendasi kepada Pengguna” adalah Penyelenggara dilarang mengarahkan calon Pemberi Dana untuk memilih sebagian calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria (layak). Penyelenggara membebaskan (tanpa memberikan masukan/saran/arahan) calon Pemberi Dana untuk memilih calon Penerima Dana yang disajikan oleh Penyelenggara.  Contoh:  Dari 5 (lima) orang calon Penerima Dana yang mengajukan, hanya 4 (empat) orang yang memenuhi kriteria berdasarkan *scoring*/penilaian Penyelenggara untuk didanai (dengan hasil scoring/penilaian yang berbeda atau sama). Penyelenggara menyajikan hasil *scoring*/penilaian atas 4 (empat) orang kepada calon Pemberi Dana untuk dipilih/didanai. Penyelenggara dilarang memberikan masukan/saran/arahan agar calon Pemberi Dana memberikan dana ke orang tertentu di antara 4 (empat) orang tersebut.  Penjelasan di atas tidak termasuk ke dalam kategori pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, karena aktivitas yang dilakukan oleh Penyelenggara termasuk ke dalam kegiatan pokok penyelenggaraan LPPBTI. |  |  |
| mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan; | Huruf j  Cukup jelas. |  |  |
| melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan; | Huruf k  Yang dimaksud dengan “melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung” adalah penawaran yang dilakukan oleh Penyelenggara baik yang dilakukan secara mandiri  maupun melalui kerja sama tertentu dengan pihak lainnya untuk melakukan penawaran produk Penyelenggara melalui sarana maupun fasilitas yang dimilikinya. |  |  |
| mengenakan biaya kepada Pengguna dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan; dan/atau | Huruf l  Cukup jelas. |  |  |
| melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga jasa keuangan lain yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar dan/atau menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan. | Huruf m  Contoh “melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga jasa keuangan lain” antara lain Penyelenggara melakukan kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat, Penyelenggara harus memperhatikan wilayah operasional dari Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. |  |  |
| menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat; | Huruf n  Cukup jelas. |  |  |
| menggunakan pihak ketiga untuk mengelola dana dari pemberi dana; | Huruf o  Cukup jelas. |  |  |
| melakukan praktik pemberian pinjaman yang tergolong sebagai pendaan tidak sehat*;* | Huruf p  Yang dimaksud dengan Pendanaan tidak sehat adalah praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi Penerima Pinjaman, atau yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali Penerima Pinjaman.  Contoh Pendanaan tidak sehat antara lain:   1. penetapan syarat, ketentuan, atau biaya (termasuk biaya atau denda keterlambatan) yang mengandung unsur tipu muslihat; 2. penetapan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak memperhatikan kemampuan Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman; atau 3. pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, pinjaman mikro, pinjaman konsumen, pinjaman harian, dan/atau bentuk pinjaman lainnya yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan biaya-biaya (termasuk biaya atau denda keterlambatan) yang tidak wajar. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 151  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. pencabutan izin. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 152  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan terkait modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku bagi Penyelenggara yang: |  |  |  |
| * 1. telah memperoleh izin; |  |  |  |
| * 1. sedang mengajukan proses perizinan; dan |  |  |  |
| * 1. telah mengembalikan tanda terdaftar dan akan mengajukan perizinan kembali, |  |  |  |
| sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
| 1. Pada saat mengajukan permohonan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara yang telah mengembalikan tanda terdaftar dan akan mengajukan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan: |  |  |  |
| 1. tidak mengalami perubahan PSP; dan |  |  |  |
| 1. memiliki jumlah ekuitas paling sedikit Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 153  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara telah menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebelum diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja penggunaan tenaga kerja asing yang telah disepakati. |  |  |  |
| 1. Pihak Utama pada Penyelenggara yang telah menjabat sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, tetap dapat menjadi Pihak Utama sampai dengan berakhirnya masa jabatan. |  |  |  |
| 1. Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum yang bersangkutan dilakukan perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 154  Cukup jelas. |  |  |
| Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan memiliki kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dikecualikan dari batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sepanjang tidak melakukan perubahan kepemilikan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 155  Cukup jelas. |  |  |
| Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan sebagai LPBBTI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 156  Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini  mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6005), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 157  Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 158  Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Pasal 30 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6668), dinyatakan tidak berlaku bagi Penyelenggara. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 159  Cukup jelas. |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta |  |  |  |
| pada tanggal … |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER |  |  |  |
| OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta |  |  |  |
| pada tanggal ... |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |  |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| YASONNA H. LAOLY |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … |  |  |  |